

Analisis Perkembangan Nilai Tukar Petani sebagai Indikator Kesejahteraan Petani di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2024

A Fahmi Latief Putra¹, Alfian Noor Rachman²

Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia¹

Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian, Indonesia²

*Email Korespondensi: afahmilp@uinssc.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 28-05-2026
Disetujui 16-06-2026
Diterbitkan 18-06-2026

ABSTRACT

The Farmers' Terms of Trade (FTT) is commonly used as an indicator to describe farmers' relative welfare by comparing the price index received by farmers and the price index paid by farmers. This study aims to analyze the development of the Farmers' Terms of Trade in West Java Province during the 2019–2024 period and interpret its position as an indicator of farmers' relative exchange position.. This research uses a descriptive method with a quantitative approach based on secondary annual data obtained from Open Data Jawa Barat. Data analysis was conducted by calculating annual value changes, annual growth rates, and interpreting the FTT based on values above or below 100. The results show that the FTT in West Java fluctuated during the study period. The value was above 100 in 2019, 2020, 2023, and 2024, while it was below 100 in 2021 and 2022. The lowest value occurred in 2021 at 97.84, while the highest value occurred in 2024 at 112.17. These findings indicate that farmers' terms of trade experienced pressure in 2021–2022 and showed improvement in 2023–2024.

Keywords: *Farmers' Terms of Trade; farmer welfare; West Java*

ABSTRAK

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan relatif petani melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024 serta menginterpretasikan posisinya sebagai indikator daya tukar petani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder tahunan yang diperoleh dari Open Data Jawa Barat. Analisis data dilakukan dengan menghitung perubahan nilai tahunan, pertumbuhan tahunan, dan menginterpretasikan Nilai Tukar Petani berdasarkan kategori di atas atau di bawah 100. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Nilai Tukar Petani berada di atas 100 pada tahun 2019, 2020, 2023, dan 2024, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 berada di bawah 100. Nilai terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 97,84, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 112,17. Temuan ini menunjukkan bahwa daya tukar petani mengalami tekanan pada tahun 2021–2022 dan menunjukkan perbaikan pada tahun 2023–2024.

Katakunci: Nilai Tukar Petani; kesejahteraan petani; Jawa Barat

PENDAHULUAN

Di Provinsi Jawa Barat, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai Rp237.631,60 miliar pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2026), dengan kontribusi dari beberapa subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Keragaman subsektor tersebut menunjukkan bahwa pertanian Jawa Barat tidak hanya bertumpu pada satu komoditas, tetapi mencakup beberapa basis produksi yang berkaitan dengan pangan, pendapatan petani, dan aktivitas ekonomi perdesaan.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan relatif petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menunjukkan daya tukar nilai produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap biaya produksi serta barang dan jasa yang dikonsumsi. Secara metodologis, NTP dihitung dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib), kemudian dikalikan 100. Nilai NTP di atas 100 menunjukkan bahwa petani mengalami perbaikan dalam hal perdagangan karena kenaikan harga yang diterima lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayarkan, sedangkan NTP di bawah 100 menunjukkan adanya penurunan daya tukar. Afifah dan Nalurita (2022) menegaskan bahwa fluktuasi harga jual komoditas tanaman pangan memiliki kontribusi signifikan secara langsung dalam menentukan tingkat kepositifan nilai tukar petani melalui optimalisasi indeks pendapatan yang diterima.

Kajian mengenai NTP telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Jolanda, Sulandjari, dan Wijaya (2024) menganalisis peramalan NTP di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data runtut waktu tahun 2013–2021. Penelitian tersebut berfokus pada peramalan NTP beberapa subsektor pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat. Penelitian lain oleh Purba, Yulianti, Raphael, dan Khotimah (2024) membahas determinan kesejahteraan petani tanaman pangan di Jawa Barat dengan menggunakan indikator Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa harga jual gabah memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan. Selain itu, Syafa'at (2025) meneliti pengaruh inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap NTP di Provinsi Jawa Barat periode 2018–2022. Riset tersebut mengungkapkan bahwa meskipun indikator makroekonomi seperti inflasi dan PDRB sektor pertanian menunjukkan arah hubungan tertentu, secara parsial keduanya tidak memberikan pengaruh signifikan yang instan dalam menggeser angka nilai tukar petani di lapangan. Dalam konteks Jawa Barat, Haris, Sarma, dan Falatehan (2017) menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, terutama dalam hal kapasitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Atas dasar signifikansi sektor tersebut, maka kajian mengenai stabilitas daya beli dan kesejahteraan relatif petani yang diproyeksikan melalui indikator seperti NTP menjadi krusial untuk dilakukan.

Selain penelitian yang secara khusus membahas Jawa Barat, sejumlah studi lain juga menunjukkan bahwa NTP banyak digunakan untuk membaca dinamika kesejahteraan relatif petani di berbagai wilayah. Aulia, Rimbodo, dan Wibowo (2021) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi NTP di Indonesia dengan menggunakan variabel Indeks Harga Konsumen, PDB harga berlaku sektor pangan, dan harga beras, sehingga menunjukkan bahwa perubahan NTP berkaitan dengan dinamika harga dan kondisi ekonomi makro. Amalia dan Nurpita (2017) juga menggunakan NTP untuk menganalisis dinamika kesejahteraan petani di Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan variabel inflasi, suku bunga, dan PDRB. Sementara itu, Bafadal (2014) menunjukkan bahwa inflasi dan PDRB sektor pertanian dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan NTP dalam konteks ekonomi makro daerah. Temuan dari beberapa

penelitian tersebut memperkuat pemahaman bahwa NTP merupakan indikator yang relevan untuk membaca kondisi ekonomi petani, meskipun interpretasinya perlu tetap dibatasi pada aspek daya tukar dan kesejahteraan relatif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang banyak menggunakan analisis regresi, peramalan, atau pendekatan ekonometrika, penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel. Penelitian ini berfokus pada analisis deskriptif perkembangan NTP Provinsi Jawa Barat tahun 2019–2024 melalui perubahan nilai, pertumbuhan tahunan, dan kategori NTP. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penyajian gambaran aktual dan ringkas mengenai dinamika daya tukar petani Jawa Barat dalam enam tahun terakhir.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, NTP Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. NTP tercatat sebesar 101,33 pada tahun 2019 dan meningkat tipis menjadi 101,41 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, NTP menurun menjadi 97,84 dan pada tahun 2022 berada pada angka 99,75. Dua tahun tersebut menunjukkan bahwa NTP Jawa Barat berada di bawah 100. Selanjutnya, NTP kembali meningkat menjadi 107,46 pada tahun 2023 dan mencapai 112,17 pada tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika daya tukar petani, terutama ketika NTP sempat berada di bawah 100 pada tahun 2021 dan 2022, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024 dan bagaimana interpretasinya terhadap kesejahteraan relatif petani. Penelitian ini tidak merumuskan hipotesis karena tidak bertujuan menguji pengaruh atau hubungan antarvariabel. Fokus penelitian diarahkan pada penggambaran perkembangan NTP berdasarkan data sekunder tahunan melalui perhitungan perubahan nilai, pertumbuhan tahunan, dan kategori NTP. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan NTP Provinsi Jawa Barat tahun 2019–2024, menghitung perubahan dan pertumbuhan tahunannya, serta memberikan interpretasi terhadap kondisi daya tukar petani berdasarkan kategori NTP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi akademisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam memahami dinamika daya tukar petani di Provinsi Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan karena penelitian ini bertujuan menggambarkan perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024 berdasarkan data yang tersedia. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka tahunan NTP. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji pengaruh atau hubungan sebab-akibat antarvariabel, tetapi untuk menyajikan, menghitung, dan menginterpretasikan perubahan NTP dari tahun ke tahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat tahun 2019–2024. Data diperoleh dari dataset Nilai Tukar Petani berdasarkan provinsi di Indonesia yang tersedia pada portal Open Data Jawa Barat. Dataset tersebut memuat variabel nama provinsi, nilai tukar petani, satuan, dan tahun pengamatan. Penggunaan data sekunder dipilih karena NTP merupakan indikator statistik resmi yang dihitung dan dipublikasikan oleh lembaga pemerintah, sehingga sesuai untuk digunakan dalam analisis deskriptif perkembangan indikator ekonomi pertanian.

Secara konseptual, NTP merupakan indikator yang menunjukkan daya tukar nilai produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap biaya produksi serta barang dan jasa yang dikonsumsi. NTP dihitung

dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), kemudian dikalikan 100. Kementerian Pertanian juga menjelaskan bahwa data perkembangan NTP bersumber dari Badan Pusat Statistik, dengan komponen utama berupa indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani.

Data NTP Provinsi Jawa Barat yang dianalisis dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2024

Tahun	Nilai Tukar Petani
2019	101,33
2020	101,41
2021	97,84
2022	99,75
2023	107,46
2024	112,17

(Sumber: Open Data Jawa Barat, diolah, 2026)

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, data NTP Provinsi Jawa Barat tahun 2019–2024 disusun dalam bentuk tabel tahunan. Kedua, dilakukan perhitungan perubahan nilai NTP antar tahun untuk mengetahui kenaikan atau penurunan NTP dari satu tahun ke tahun berikutnya. Ketiga, dilakukan perhitungan pertumbuhan tahunan NTP dalam bentuk persentase. Keempat, nilai NTP diinterpretasikan berdasarkan kategori NTP lebih dari 100, sama dengan 100, atau kurang dari 100. Interpretasi ini mengacu pada metadata BPS yang menjelaskan bahwa NTP lebih dari 100 menunjukkan peningkatan dalam hal perdagangan, NTP sama dengan 100 menunjukkan tidak ada perubahan dalam hal perdagangan, dan NTP kurang dari 100 menunjukkan penurunan dalam hal perdagangan.

Perubahan nilai NTP dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Perubahan NTP} = \text{NTPt} - \text{NTPt-1}$$

Keterangan:

NTPt = Nilai Tukar Petani pada tahun berjalan

NTPt-1 = Nilai Tukar Petani pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan tahunan NTP dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan NTP (\%)} = ((\text{NTPt} - \text{NTPt-1}) / \text{NTPt-1}) \times 100$$

Keterangan:

NTPt = Nilai Tukar Petani pada tahun berjalan

NTPt-1 = Nilai Tukar Petani pada tahun sebelumnya

Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif. Tabel digunakan untuk menampilkan nilai NTP, perubahan poin, pertumbuhan tahunan, dan kategori kondisi NTP. Uraian deskriptif digunakan untuk menjelaskan pola perkembangan NTP Jawa Barat selama periode penelitian serta memberikan interpretasi terhadap kondisi daya tukar petani. Dengan demikian, hasil penelitian dibatasi pada pembacaan perkembangan NTP sebagai indikator kesejahteraan relatif petani, bukan sebagai ukuran menyeluruh atas kesejahteraan rumah tangga petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2024

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Open Data Jawa Barat, yaitu dataset Nilai Tukar Petani berdasarkan provinsi di Indonesia yang memuat variabel nama provinsi, nilai tukar petani, satuan, dan tahun. Hasil pengolahan data NTP Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Barat Tahun 2019–2024

Tahun	NTP	Perubahan Poin	Pertumbuhan (%)	Kategori
2019	101,33	-	-	Di atas 100
2020	101,41	0,08	0,08	Di atas 100
2021	97,84	-3,57	-3,52	Di bawah 100
2022	99,75	1,91	1,95	Di bawah 100
2023	107,46	7,71	7,73	Di atas 100
2024	112,17	4,71	4,38	Di atas 100

(Sumber: Open Data Jawa Barat, diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 2, NTP Jawa Barat pada tahun 2019 tercatat sebesar 101,33 dan meningkat tipis menjadi 101,41 pada tahun 2020. Kenaikan sebesar 0,08 poin atau 0,08 persen menunjukkan bahwa pada awal periode pengamatan, NTP Jawa Barat relatif stabil dan berada sedikit di atas angka 100. Berdasarkan interpretasi BPS, NTP di atas 100 menunjukkan bahwa petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan karena rata-rata tingkat harga yang diterima petani meningkat lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat harga yang dibayarkan terhadap tahun dasar.

Pada tahun 2021, NTP Jawa Barat turun menjadi 97,84. Penurunan ini merupakan penurunan terbesar selama periode pengamatan, yaitu sebesar 3,57 poin atau -3,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi NTP yang berada di bawah 100 menunjukkan adanya penurunan dalam hal perdagangan, yaitu ketika perubahan harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan perubahan harga yang dibayarkan petani. Dengan demikian, tahun 2021 dapat dibaca sebagai periode ketika daya tukar petani Jawa Barat mengalami tekanan berdasarkan indikator NTP.

Pada tahun 2022, NTP meningkat menjadi 99,75 atau tumbuh sebesar 1,95 persen dibandingkan tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan, nilai tersebut masih berada di bawah 100. Artinya, perbaikan NTP pada tahun 2022 belum cukup untuk mengembalikan posisi daya tukar petani ke kategori di atas 100. Oleh karena itu, tahun 2021 dan 2022 dapat dipahami sebagai periode ketika NTP Jawa Barat berada dalam kondisi relatif lebih lemah dibandingkan tahun-tahun lain dalam periode penelitian.

Perbaikan yang lebih jelas terlihat pada tahun 2023. NTP Jawa Barat meningkat menjadi 107,46 dengan pertumbuhan sebesar 7,73 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode 2019–2024. Pada tahun 2024, NTP kembali meningkat menjadi 112,17 atau tumbuh sebesar 4,38 persen. Nilai NTP tahun 2024 merupakan nilai tertinggi dalam periode penelitian. Secara keseluruhan, NTP Jawa Barat meningkat dari 101,33 pada tahun 2019 menjadi 112,17 pada tahun 2024, atau naik sebesar 10,84 poin.

Interpretasi Perubahan NTP terhadap Daya Tukar Petani

Perubahan NTP Jawa Barat selama 2019–2024 menunjukkan adanya tiga fase utama. Fase pertama terjadi pada tahun 2019–2020, ketika NTP berada sedikit di atas 100 dan relatif stabil. Pada fase ini, daya tukar petani dapat dikatakan berada dalam kondisi relatif baik, tetapi margin kelebihanannya masih kecil

karena nilai NTP hanya sedikit di atas 100.

Fase kedua terjadi pada tahun 2021–2022, ketika NTP berada di bawah 100. Posisi NTP Jawa Barat yang berada di bawah 100 pada tahun 2021 dan 2022 perlu dibaca secara hati-hati. Secara konseptual, NTP dipengaruhi oleh perubahan indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Metadata BPS menjelaskan bahwa NTP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani, sehingga perubahan NTP tidak dapat dilepaskan dari dinamika harga output pertanian, biaya produksi, dan konsumsi rumah tangga petani. Studi Keumala dan Zainuddin (2018) juga menunjukkan bahwa kenaikan NTP tidak selalu dapat dimaknai secara sederhana sebagai peningkatan kesejahteraan, karena perubahan NTP dapat dipengaruhi oleh produktivitas, harga gabah, harga barang konsumsi, harga pupuk, serta biaya produksi. Dengan demikian, NTP di bawah 100 pada 2021–2022 lebih tepat diinterpretasikan sebagai indikasi tekanan daya tukar petani, bukan sebagai kesimpulan menyeluruh bahwa seluruh petani mengalami penurunan kesejahteraan.

Fase ketiga terjadi pada tahun 2023–2024, ketika NTP kembali meningkat dan berada di atas 100. Kenaikan NTP pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perbaikan posisi NTP dibandingkan dua tahun sebelumnya. Namun, hasil ini tetap perlu diletakkan dalam konteks keterbatasan data yang digunakan. Penelitian Tenriawaru et al. (2021) menunjukkan bahwa NTP tanaman pangan dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel seperti luas panen, produksi, harga jual output, biaya pupuk dan pestisida, serta konsumsi rumah tangga petani. Fajri, Marwanti, dan Rahayu (2016) juga menunjukkan bahwa produktivitas padi, luas lahan, harga gabah, biaya pupuk, dan pengeluaran nonmakanan rumah tangga dapat memengaruhi nilai tukar petani padi. Oleh karena itu, peningkatan NTP Jawa Barat pada 2023–2024 dalam penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai perbaikan indikator daya tukar secara agregat, bukan sebagai bukti langsung bahwa seluruh aspek kesejahteraan rumah tangga petani telah membaik.

Keterbatasan NTP sebagai Indikator Kesejahteraan Petani

NTP sering digunakan sebagai indikator untuk membaca kesejahteraan relatif petani karena menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima dan harga yang dibayar petani. Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa NTP berguna untuk mengukur kemampuan produk yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi maupun konsumsi rumah tangga.

Meskipun demikian, penggunaan NTP sebagai indikator kesejahteraan perlu dilakukan secara hati-hati. Rachmat (2013) menjelaskan bahwa NTP belum sepenuhnya menggambarkan kesejahteraan petani karena pengukurannya berbasis indeks harga dan tidak sepenuhnya mengakomodasi perubahan produktivitas, teknologi, maupun kuantitas produksi. Dengan demikian, dalam penelitian ini NTP diposisikan sebagai indikator kesejahteraan relatif atau daya tukar petani, bukan sebagai ukuran tunggal untuk menilai kesejahteraan petani secara menyeluruh. Keterbatasan tersebut menjadi penting karena NTP pada dasarnya lebih dekat dengan indikator daya tukar harga daripada indikator kesejahteraan rumah tangga secara menyeluruh. Kajian terbaru oleh Wahyudi dan Agustian (2025) juga menyatakan bahwa NTP lebih relevan untuk mengetahui daya tukar petani dan tidak selalu berkaitan langsung dengan pendapatan serta kesejahteraan petani secara komprehensif. Oleh karena itu, penggunaan NTP dalam penelitian ini dibatasi sebagai indikator kesejahteraan relatif, bukan ukuran tunggal untuk menilai kondisi sosial ekonomi petani.

Berdasarkan batasan tersebut, hasil penelitian ini sebaiknya dibaca sebagai gambaran awal mengenai dinamika daya tukar petani di Jawa Barat. NTP yang berada di bawah 100 pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan adanya tekanan terhadap daya tukar petani, sedangkan kenaikan pada tahun 2023 dan

2024 menunjukkan adanya perbaikan posisi relatif. Namun, untuk memperoleh gambaran kesejahteraan petani yang lebih lengkap, penelitian selanjutnya perlu menambahkan data lain seperti indeks harga yang diterima petani, indeks harga yang dibayar petani, NTP per subsektor, Nilai Tukar Usaha Pertanian, pendapatan petani, biaya produksi, dan produktivitas usaha tani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode pengamatan. NTP Jawa Barat berada di atas 100 pada tahun 2019, 2020, 2023, dan 2024, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 berada di bawah 100. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya tukar petani Jawa Barat sempat mengalami tekanan pada tahun 2021–2022, kemudian kembali membaik pada tahun 2023–2024.

Secara kuantitatif, NTP Jawa Barat meningkat dari 101,33 pada tahun 2019 menjadi 112,17 pada tahun 2024. Nilai terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 97,84, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 112,17. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 7,73 persen, yang menunjukkan perbaikan posisi NTP setelah dua tahun sebelumnya berada di bawah 100.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NTP dapat digunakan sebagai indikator awal untuk membaca perkembangan kesejahteraan relatif petani, khususnya dari sisi daya tukar hasil pertanian terhadap biaya yang dibayarkan petani. Namun, NTP tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kesejahteraan petani karena indikator ini belum sepenuhnya menggambarkan aspek pendapatan riil, produktivitas, volume produksi, kepemilikan aset, maupun kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai gambaran deskriptif mengenai dinamika daya tukar petani di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data yang lebih rinci, seperti Indeks Harga yang Diterima Petani, Indeks Harga yang Dibayar Petani, Nilai Tukar Usaha Pertanian, NTP per subsektor, serta indikator sosial ekonomi petani. Penggunaan data yang lebih lengkap dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan petani di Provinsi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Nalurita, L. (2022). Analisis determinan nilai tukar petani tanaman pangan di Indonesia. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 455–468. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i1.2022.455-468>
- Amalia, N., & Nurpita, A. (2017). Analisis dinamika kesejahteraan petani di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 222–227. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.574>
- Aulia, S. S., Rimbodo, D. S., & Wibowo, M. G. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar petani (NTP) di Indonesia. *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 6(1), 44–59. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v6i1.1925>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Detail metadata indikator statistik: Nilai Tukar Petani. Sistem Rujukan Statistik. Diakses 2 Juni 2026, dari <https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/5217>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2026). Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga

- berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Barat, 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/UzFSTVVXUlliME5XYzBZNUwwNVFRa3h6Y1d3M1p6MDkJMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha---di-provinsi-jawa-barat--miliar-rupiah---2024.html?year=2024>
- Bafadal, A. (2014). Pengaruh kinerja ekonomi makro terhadap nilai tukar petani. *Quantitative Economics Journal*, 3(3), 162–178. <https://doi.org/10.24114/qej.v3i3.17451>
- Fajri, M. R., Marwanti, S., & Rahayu, W. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan petani padi di Kabupaten Sragen. *Agriasta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agribisnis UNS*, 4(2), 85–94.
- Haris, W. A., Sarma, M., & Falatehan, A. F. (2017). Analisis peranan subsektor tanaman pangan terhadap perekonomian Jawa Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(3), 231–242. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.3.231-242>
- Jolanda, H. P., Sulandjari, K., & Wijaya, I. P. E. (2024). Analisis peramalan nilai tukar petani di Provinsi Jawa Barat. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1). <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.11746>
- Kementerian Pertanian. (n.d.). Konsep dan definisi Nilai Tukar Petani (NTP). Basis Data Nilai Tukar Petani. Diakses 2 Juni 2026, dari <https://11ap.pertanian.go.id/ntp/konsep.php>
- Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan pembiayaan syariah sebagai solusi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129–149. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2108>
- Open Data Jawa Barat. (n.d.). Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan provinsi di Indonesia. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Diakses 1 Juni 2026, dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/nilai-tukar-petani-ntp-berdasarkan-provinsi-di-indonesia>
- Purba, S. F., Yulianti, A., Raphael, Y., & Khotimah, H. (2024). Determinan kesejahteraan petani tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(1), 59–67. <https://doi.org/10.18343/jipi.29.1.59>
- Rachmat, M. (2013). Nilai tukar petani: Konsep, pengukuran dan relevansinya sebagai indikator kesejahteraan petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(2), 111–122. <https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.111-122>
- Syafa'at, I. A. S. (2025). Pengaruh inflasi dan PDRB terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jawa Barat. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 10(1), 222–232.
- Tenriawaru, A. N., Arsyad, M., Amiruddin, A., Viantika, N. M., & Meilani, N. H. (2021). Analisis dan determinan nilai tukar petani tanaman pangan (NTPP) di Provinsi Sulawesi Selatan. *Agritexts: Journal of Agricultural Extension*, 45(2), 146–151. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i2.57364>
- Wahyudi, W., & Agustian, A. (2025). Kajian kritis pengukuran kesejahteraan petani melalui metode Nilai Tukar Petani dan Indeks Kesejahteraan Petani. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 2(1). <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/jp3/article/view/3968>